

## **CARI PEMIMPIN DAN KEPEMIMPINAN NASIONAL YANG TEPAT BAGI MASA DEPAN**

Oleh:

**Syafrida**

**M.Makhfudz**

Email: M\_makhfudz@yahoo.com

Email: Syafrida\_01@yahoo.com

Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa

### **ABSTRAK**

Kondisi Negeri kini sedang alami krisis kepemimpinan nasional yang melanda penyelenggara negara, organisasi pemerintahan yang terus memperhatikan. Kondisi demikian jika dilihat dari sejarah penyelenggaraan negara di era orde lama dan orde baru tidak lebih baik ketimbang reformasi dari segi pemimpin yang miliki moral etik yang luhur. Hal ini sangat mempengaruhi berkembangnya negara untuk maju saingi negara bangsa yang lainya. Sehingga terus di sibukan oleh kegiatan pembenahan dan atur strategi penyelenggaraan negara agar bersih dari korup dan pungli yang sebabkan biaya tinggi, kemudian segera sigapi tindakan tegas segera tetapkan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli.

**Kata kunci: moral etik, strategi hadapi hambatan**

### **ABSTRACT**

*Currently, the national leadership crises suffers our national life. In comparison with Indonesian old and new order, this situation points out that our current political life is not better than its predecessors. This symptom resists our national effort to promote our nation-state into a competitive state in the international scope. Therefore, the government should pay attention to what is to be done as well as allocate more funds to eradicate the corruption in the Indonesian administration. Here, the administration issued the Presidential Regulation Number 87 of 2016 on the Establishment of 'Sapu Bersih Pungli' Task Force.*

**Keyword : ethic, strategy, obstacle**

## PENDAHULUAN

Kepemimpinan Nasional ditengah percaturan internasional, pada saat ini sangat penting kita cermati bersama di tengah-tengah suasana persaingan global yang makin meruncing. Pemilihan pemimpin Nasional yang memiliki kepemimpinan nasional yang tepat terasa sangat penting, agar Indonesia bisa menempati posisi terhormat di dunia Internasional. Perubahan sosial politik dan budaya ini menghasilkan pergeseran tatanan yang sebelumnya dianggap mapan, karena telah mengalami proses reformasi. Proses tersebut diikuti dengan bergulirnya proses demokrasi yang ditandai dengan otonomi daerah semakin kuat, pembagian kekuasaan yang lebih merata.

Perubahan bidang ekonomi global memicu perkembangan/perubahan organisasi makin dinamis, di Indonesia mempengaruhi sikap para pemimpinnya untuk hidupkan ketergantungan Internasional asing sulit dihindari. Aspek sosial budaya, masuknya pengaruh nilai-nilai barat, lewat perkembangan teknologi informasi yang cepat menimpa generasi muda. Perubahan teknologi melahirkan dua efek, ke negeri kita yaitu pertama positif melahirkan tokoh-tokoh muda yang inovatif dan visioner, sedang sisi lain efek negatif, berupa beberapa perilaku kurang terpuji karena melahirkan perilaku meniru dengan menyerap hal-hal yang mudah di serapnya, yang belum tentu mengarah pada hal yang produktif, seperti suka bermalasan-malasan, narkoba dan kenakalan remaja. Demikian pula di kalangan pejabat hampir sama, seperti narkoba, hilang rasa malunya untuk melakukan sesuatu yang tidak baik seperti korupsi, kolusi (jual-beli jabatan yang kini marak dimana-mana).

Sebagai negara bangsa, masyarakat Indonesia mulai kehilangan perilaku utamanya, antara lain; kini tak lagi menjadi bangsa yang disiplin berlandaskan pada kehormatan, perilaku yang santun. Beberapa pakar menyatakan bahwa demokrasi bergerak liar dalam arti bergerak tanpa kendali, alias “kebablasan”, sehingga siapapun cenderung memperjuangkan haknya saja melupakan kewajiban, seperti kita melihat sikap anggota DPR yang merasa tersinggung oleh sikap tegasnya KPK yang terus bongkar korupsi dan kerap mengkapai kader partainya dengan kewenangan KPK yang di sebut “Operasi Tangkap Tangan”

(OTT). Terlebih lebih setelah KPK keluarkan daftar Anggota DPR yang terlibat dan dapat aliran dana anggaran e-ktip, kemudian para anggota DPR segera membentuk Pansus Hak Angket KPK, guna mengadili KPK dengan gunakan Gedung DPR sebagai meja Hijau guna mengadili KPK. Caranya dengan mengundang pada Narapidana kasus Korupsi guna ungkap kesalahan KPK yang di anggap telah langgar Hak asasi Manusia dan Hukum Acara Pidana umumnya.

Disamping itu anggota DPR telah gunakan kekuasaan guna desak Presiden untuk segera “ Bekukan KPK “ dengan cara mencabut kewenangan KPK untuk melakukan “penyadapan “ dan desak Presiden cabut kewenangan KPK gunakan kewenangan melakukan “ Operasi Tangkap Tangan” (OTT). Seolah DPR merasa resah atas sikap tegasnya KPK melakukan penyadapan guna mendasarkan melakukan OTT terhadap siapapun yang sedang berjanji akan melakukan suap atau korupsi yang di lakukan oleh siapapun mulai dari anggota DPR sampai Bupati /Walikota atupun Gubernur. Lebih marah lagi setelah KPK berani memberikan status tersangka pada diri ketua DPR. Dari peristiwa itu membuat DPR makin meradang dengan puncaknya tuntutan segera Presiden bekukan KPK dan hentikan KPK melakukan Tangkap Tangan.

Kemudian DPR dan kelompoknya gunakan kekuasaannya bekingi Lembaga Peradilan guna memenangkan gugatan Pra peradilan, dan terbukti sukses pengaruhi Hakimnya untuk memenangkan gugatan Ketua DPR. Ambisi kekuasaan ini tak sampai ini saja, kemudian galang kekuatan dengan Lembaga Negara yang di anggap mudah dipengaruhi seperti KEJAGUNG dan POLRI untuk ikut mengadili KPK sebagai pesakitan. Semua mereka ungkap seolah kesalahan KPK, tak ingat komitmen sewaktu pembentukan KPK dengan kewenangan istimewa pada KPK sebagaimana lembaga sejenis KPK di dunia, seperti penulis ketahui di Singapura dan Korea. Seolah Negara ini yang punya hak menguasai hanya DPR Dari kondisi ini, kita ingat pada kata-kata atau pesan pemimpin Singapura “Lee Kuan Yew” soal demokrasi ; yaitu *I believe what a country need to develope is disvrplise more than democracy. The Exeberance conduct, which are minical to development.*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Harian Kompas terbitan tanggal 21 desember 2007 tulisan Amich Alhumnire, tentang exuberance” dari Demokrasi”

Dengan tanpa mengurangi arti dari usaha para pemimpin Indonesia masa lalu maupun masa kini terasa sekali, bahwa saat ini perilaku bangsa ini yang biasanya dikenal penuh kesantunan ternyata telah berubah. Disamping itu juga ada diisyaratkan dari sebuah ajaran agama yang bersumber pada hadist Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:” Akan datang kepada manusia suatu zaman, dimana orang tidak peduli lagi tentang harta yang didapatnya apakah dari yang halal atau dari yang haram.”<sup>2</sup>

Kejadian tersebut diatas tidak perlu menjadi penghambat untuk menuju kearah perbaikan, mengingat bagaimanapun harus diakui, bahwa dalam gerak masa yang terus berjalan kita sebagai bangsa telah mencapai berbagai keberhasilan dalam mengatasi kesulitannya, seperti telah merubah sistem demokrasi makin terbuka, diakuinya kebebasan berpendapat, kebebasan pers, lebih terlindunginya hak asasi manusia dan sebagainya.

## PERMASALAHAN

Permasalahan bangsa yang kini dihadapi bersama, setelah terjadi perubahan besar disatu sisi telah melahirkan hal yang positif, seperti terjadinya kebebasan berpendapat, berorganisasi serta pers yang dianggap mampu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh suasana krisis global tapi disisi lain terjadinya kelompok dikalangan masyarakat, muncul kelompok apatisisme yang dicerminkan adanya kelompok warga yang tidak mau aktif gunakan hak pilihnya, mereka disebut golput telah meningkat dari dekade ke dekade. Namun oleh pemimpin Singapura Lee Kuan Yew di Indonesia telah terjadi”*exu berance*” (demokrasi kebablasan), karena reformasi lebih melahirkan perilaku yang jauh dari disiplin dan kehormatan. Ini semua ditandai kejadian memalukan pada kalangan pemimpin, terjadi pada pemimpin daerah yaitu pada para Bupati/Walikota yang tertangkap tangan KPK berjumlah 79, belum terhitung yang ada dilingkungan DPR setelah terbongkarnya Mega Korupsi E-KTP.

Jadi permasalahan bangsa ini dapat disimpulkan, bahwa negeri ini sedang terjadi krisis kepemimpinan, sehingga tepatlah judul dalam makalah ini “ Mencari Kepemimpinan macam apa yang tepat untuk pemimpin bangsa ini kedepan”?. Hal

---

<sup>2</sup> Wawasan Alqur,an M.Quraish Shihab, hal 254, Penerbit Mizan 1996, Bandung

ini perlu dijadikan topik karena peringkat negeri terkorup terus meningkat. Hasil survey World Economic forum Indonesia di tahun 2015 jadi peringkat ke 88 dengan skor CPI 36, Jadi Indonesia tingkat korupsinya meningkat 2 point dari tahun 2014 berada diperingkat 107.<sup>3</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan dari makalah/naskah ini menggunakan metode deskriptif normatif menguraikan permasalahan yang ada dikaitkan dengan sumber sumber bahan hukum yang didapat dari metode yang menggunakan *library research*. Sumber hukum sekunder maupun berupa bahan hukum primer yang dianalisis dari teori-teori atau pendapat ahli hukum pada umumnya dan ahli Hukum Tata Negara pada khususnya yang dihubungkan dengan praktek dilapangan dalam memilih pemimpin bangsa yang tepat baik yang dilakukan melalui proses demokrasi maupun cara perekrutan yang dilakukan melalui partai untuk diikutsertakan dalam pilkada atau pemilu.

## **PEMBAHASAN**

Gambaran diatas adalah merupakan kejadian yang tidak perlu menjadi penghambat untuk menuju kearah perbaikan mengingat, bagaimanapun harus diakui bahwa dalam gerak tahun berjalan kita telah juga mencapai beberapa keberhasilan dalam mengatasi kesulitan bersama. Keberhasilan ini merupakan modal dasar negara bangsa untuk secara optimis terus menuju kesejahteraan dan menyelesaikan banyak pekerjaan rumah. Salah satu pekerjaan rumah yang harus dicermati adalah menaikkan daya saing bangsa, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Di alam globalisasi, negara yang bisa bertahan hidup hanya negara yang memiliki daya saing kuat, sehingga mampu bertahan dengan kemandiriannya. Bagaimana daya saing Indonesia? penulis mensitir yang pernah ditulis dalam buku Hukum Adminstrasi Negara terbitan Graha Ilmu 2013, yang didasarkan pada hasil survey *Word Economic Forum* (WEF). Index daya saing global Indonesia tahun 2012 turun. Tahun 2011 berada pada posisi 46 tahun 2012 turun keposisi 50

---

<sup>3</sup> Laporan KPK 2015

dari 144 negara, namun di tahun 2015 kita bersyukur naik bias naik menjadi 43. (lihat Grafik dibawah ini).<sup>4</sup>

Tabel Proses Ijin, dibandingkan 5 negara

	Priode		
	Negara	2012-2013	2014-2015
1	Singapura	2 hari	2 hari
2	Malaysia	10 hari	7 hari
3	Thailand	12 hari	10 hari
4	Brunai	14 hari	14 hari
5	Indonesia	33 hari	21 hari

Indonesia masih sangat ketinggalan dibandingkan dengan beberapa negara setara, seperti Thailand, Singapura, Malaysia, Meksiko bahkan Vietnam seperti tertera dalam bagan ini.<sup>5</sup>

		Peringkat			
	Negara	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2015
1	Singapura	3	2	2	1
2	Malaysia	26	21	25	23
3	Brunai	28	28	28	28
4	Thailand	38	39	38	38
5	Indonesia	44	46	50	43
6	Philipina	85	75	65	65
7	Vietnam	59	65	75	75
8	Kamboja	109	97	85	85

Index peringkat Indonesia di tahun 2015 naik signifikan dibandingkan 2012, namun tetap masih dibawah Singapura, Malaysia dan Thailand karena telah dibuka pelayanan investasi disatu pintu yang diserahkan ke BKPM sebagai leading sector pertama diharapkan juga bisa mempercepat waktu proses perizinan.

<sup>4</sup> Makhfudz, *Hukum Adminstrasi Negara*, Graha Ilmu Jakarta, hal 64, sumber CPI dari Word Economic Forum 2015 dn Berlsmenn Fondation Index.

<sup>5</sup> Ibid hal.65

Memang Negara kita selama lima tahun dari 2012 telah terjadi kemajuan, terutama dalam kurun waktu lima tahun dari 2012 telah terjadi perubahan pelayanan yang lebih cepat tapi kemajuan ini masih kalah dibandingkan dengan Negara lain utamanya dengan Singapura, Malaysia dan Thailand.

Menurut Direktur Eksekutif *Institute for Development of Economic and Finance* (INDEF), buruknya pelayanan kita masih pada berbelit belitnya proses yang harus melalui tahapan prosedur yang panjang konon sampai melalui 19 kursi mulai dari pusat sampai daerah. Selain itu juga masih ada perbedaan kepentingan antara pusat dan daerah. Setelah melihat deretan ranking negara-negara setara tersebut dimana Indonesia masih tertinggal, maka Presiden segera merubah proses perizinan dengan BKPM sebagai leading sektor utama untuk buka pelayanan terpadu dengan maksud melakukan penyederhanaan prosedur dengan bentuk Pos Pelayanan Terpadu (PTSP) dengan mempersingkat secara bertahap mulai dari 90 hari berubah menjadi 33 hari di tahun 2010, kini diharapkan bisa menjadi 21 hari, Namun demikian masih juga ditemui kendala yaitu masih banyaknya pungutan liar. Presiden dalam menghadapi kondisi demikian kemudian mengambil sikap tegas, dengan segera membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang kala itu dibarengi dengan ditangkapnya petugas pengurusan surat-surat kendaraan di Dinas Perhubungan yang sedang melakukan pungutan liar dan menyusul di kepolisian. Namun menurut penulis kini gerakan sapu bersih itu terlihat mati suri tak ada suaranya lagi.

Kalau dilihat dari institusi yang menangani kemungkinan terjadi kendala/hambatan di kepolisian, beda dengan KPK yang terus sigap tangkapi pelaku yang melakukan pungli atau suap yang menghambat kemajuan investasi, sebagaimana laporan pejabat yang berstatus tersangka korupsi. Komponen Negara sebagai alat perlengkapan negara seyogyanya semua mendukung langkah negara dalam hal ini eksekutif yang terus berusaha membersihkan hambatan laju investor. Sehingga layaklah DPR membantu langkah eksekutif dengan mendukung KPK dalam usahannya memberantas korupsi dengan satu satunya alat atau sarana Operasi OTT dan penyandapan seperti pada lembaga sejenis KPK di Singapura

dan Korea. Bukannya DPR malahan menghambat KPK dengan mengusulkan pembekuan KPK.

Daftar pejabat Berstatus Tersangka Korupsi dari Tahun 2011

No	Nama Jabatan	Tingkat jabatan		
		Eselon I	Eselon II	Eselon III
1	Kemendagri	1	1	3
2	Kemendes (PDT)	1	1	3
3	Kemenuh	1	1	3
4	KemenAgama	1	1	3
5	Kemenkeu	1	1	3
6	Anggota DPR	99	-	-
7	Pengadilan	4 hakim		3 panitera
8	Bupati	79		
9	Sekda	-	24	-
10	Gubernur	3	-	-
11	Kemenpora	1	1	-
12	Rektor	3	-	-

Hasil pengamatan penulis melalui perkembangan di media:

Angka-angka tersebut diatas, menunjukkan kerja KPK yang makin efektif dan dipengaruhi juga *akuntabilitas public* yang meningkat dan juga pencegahan korupsi yang makin efektif. Peran KPK yang makin aktif, walau ditengah-tengah perlawanan oleh DPR agar KPK terhambat dalam bongkar mega korupsi E-KTP. Dari fenomena tersebut, penulis dalam renungannya menemukan hal hal apa yang menjadi faktor penyebab dengan sebuah pertanyaan: apa sebenarnya yang menyebabkan munculnya fenomena yang memprihatinkan tersebut diatas? dari hasil perenungan penulis menganalisa ada beberapa kemungkinan yang ada benang merahnya adalah kurangnya disiplin berbangsa dan menurunnya nilai penjagaan terhadap kehormatan diri sebagai bangsa yang ditunjukkan dalam perilaku keseharian, terutama kurangnya sikap pemimpin-pemimpin bangsa yang dapat diteladani (*role modeling*).



Perlu dipahami peran pemimpin negara bukanlah semata-mata pemimpin tertinggi negara saja di jajaran dibawahnya, mulai Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sampai Lurah, kerja keras pemimpin akan sia-sia bila, apabila jajaran dibawahnya tidak menampilkan performa sebagai hasil perilaku luhur yang sama. Dengan demikian tantangan kedepan kepemimpinan negara bangsa diantaranya adalah sampai berapa jauh amanat Pasal 33 UUD 1945 dan sila ke 5 Pancasila dapat terwujud, sehingga Indonesia semakin meningkat daya saingnya dalam percaturan Negara-negara di dunia, khususnya di era globalisasi.

Pemimpin bangsa sebagai pemimpin tertinggi harus memiliki tatapan mata jauh kedepan, memikirkan masa depan bangsa agar bangsa ini tidak hancur tertelan lajunya zaman, seperti sejarah yang lalu banyak bangsa yang hancur dan hilang musnah. Maka pemimpin harus memikirkan sebuah kelangsungan bangsa dan kelanggengan bangsa dengan sebuah ide membangun karakter bangsa, seperti gagasan pemimpin bangsa kita yang sekaligus sebagai pendiri bangsa dan Negara (*the founding father*) dengan pernyataan yang dikenal *nation and character building*, namun ide besar itu sulit diwujudkan, karena tidak ada tidak ada prinsip yang harus dipedomani. Hampir disetiap negara memiliki gagasan itu, penulis bisa sebut di Malaysia yang disebut MSC (*Multimedia Super Corridor*) yaitu sebuah impian besar Malaysia untuk menjadi negara maju dalam bidang teknologi informasi.<sup>6</sup> Dalam bidang pendidikan, Malaysia telah menjabarkan gagasan besar ini dengan apa yang disebut *Smart School* atau Sekolah Bestari.

Untuk membangun rasa persatuan dan kesatuan antar etnis, Malaysia telah mengembangkan model Sekolah Berasrama Penuh (SBP). Namun yang menjadi pertanyaan, di negeri kita sudah menerapkannya untuk menciptakan calon pemimpin daerah yaitu STPDN, sekolah calon Camat sampai kini terus dilanda noda kekerasan yang ditandainya banyak peserta didik menjadi korban/ gugur akibat kekerasan yang terjadi hampir tiap tahun yang dimulai dari tahun 2000. Penulis berpendapat mungkin ada problem dipelaksanaan sistemnya, namun harus tetap optimis, masih banyak contoh dalam sistem sekolah berasrama yang belum hadapi kekerasan yaitu dipelaksanaan pondok- pondok pesantren, belum terdengar terjadi kekerasan, mungkin perlu mencontohnya dan menerapkannya.

---

<sup>6</sup> Suparlan, Med. *Pendidikan Karakter*, Penerbit Hidayat, 2012 Yogyakarta hal, 145

Menurut ahli pendidikan adalah salah satu model pendidikan karakter yang harus menjadi perhatian para pengelola dan pelaksana pendidikan yaitu model holistic terintegrasi kedalam semua pelajaran dan semua kegiatan sekolah dengan melalui proses pembiasaan dan pembudayaan disekolah disebutnya pendidikan karakter harus menjadi budaya sekolah atau *school culture* di sekolah.<sup>7</sup> Dengan model ini, keberhasilan sekolah tidak hanya dipandang sebelah mata hanya dari satu aspek keberhasilan akademik saja, tetapi juga dari karakter yang mampu membentuk siswa menjadi pribadi yang memiliki kecerdasan emosional dan sosialnya. Model pendidikan karakter menurut konsep LSD (*Life Skill Development*) yang diterapkan melalui langkah-langkah sebagai berikut yaitu dengan menerapkan sepuluh (10) pilar karakter antara lain:

1. Tanggung jawab
2. Disiplin
3. Percaya diri
4. Mandiri
5. Kerjasama
6. Jujur
7. Peduli sopan
8. Hormat dan
9. Sabar.

Kemudian dilakukan evaluasi terus dalam penerapan pendidikan karakter secara berkala dilakukan secara universal, lalu dilihat dampaknya terhadap hasil pendidikannya apakah telah memberikan fondasi yang kuat bagi kompetensi lulusan yang diharapkan. Misalnya pendidikan kejujuran yang diberikan kepeserta didik telah mampu membentuk perilaku jujur setelah menamatkan pendidikannya. Dampak inilah dari suatu proses pendidikan yang dapat diperoleh, cara berpikir kritis, berpikir rasional, bahkan juga pendidikan karakter dengan "*Core Universal Ethical Value*" yang diberikan tidak akan dapat secara instan kita lihat hasilnya. Melalui proses yang panjang setelah beberapa lama nanti bisa terlihat ada hubungan korelatif yang signifikan antara pelaksanaan pendidikan karakter dengan hasil belajar bila telah terlihat meningkat pilar karakter, misalnya telah

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 139

tercipta “semangat kerja keras” bila sudah maka pendidikan karakter dapat menjadi fundamen dasar yang kuat untuk meningkatkan daya saing dimasa depan. Sehingga bisa diharapkan masa depan bila kelak sudah mengabdikan pada negara menjadi pengabdian yang memiliki semangat kerja keras dan jujur.

Setelah beberapa dekade berlangsungnya proses pendidikan karakter, diharapkan telah menghasilkan generasi penerus yang baik, artinya berkarakter baik, bermoral luhur, sehingga baru kita lakukan pencarian pemimpin yang memiliki kepemimpinan luhur mendekati paripurna. Dalam membahas kepemimpinan ini, penulis mensitir dari pendapat para ahli antara lain memiliki unsur: Sikap Moral yang Luhur. Sebagai pemimpin sudah seharusnya mempunyai sikap yang berlandaskan kepada standar moral yang tinggi dengan kata lain seorang pemimpin diperlukan sikap moral yang meliputi pembentukan karakter yang berbudi luhur (*character building*). Selain itu juga seorang pemimpin harus mampu menguasai kemampuan yang tinggi untuk mewujudkan visinya yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur prilakunya dan keberanian untuk mengambil keputusan. Kemampuan tersebut harus didukung oleh kompetensi yang tinggi baik menyangkut pengetahuan (*knowlege*), keterampilan (*skill*) dan pematangan psikologis. Sebagaimana penulis mensitir pendapat HM Faisal Tamin ( Mantan Menpan).<sup>8</sup> yang mengutip pendapat Keith Davis yang merumuskan unsur-unsur:

1. *Human Perfomance*= *Ability* (kemampuan) + *Motivation*
2. *Motivation*= *Attitude* (sikap) + *situation*(situasi)
3. *Ability*= *Knowloge* (kemampuan Potensi) + *skill*

Uraian secara psikologis, kemampuan (*ability*) kepemimpinan terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan *reality* (*knowloge* + *skill*) artinya pegawai yang memiliki IQ yang tinggi dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari hari, maka ia lebih mudah mencapai prestasi kerja yang diharapkan. Motivasi terbentuk dari sikap (*attitude*) seseorang dalam menghadapi situasi (*situation*), kerja motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri secara terarah untuk mencapai tujuan organisasi. Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara maksimal. Faktor integritas juga ikut

---

<sup>8</sup> Bahan seminar Nasional ke 13 STIPAN 2017, hal 8

mendukungnya sebagai seorang pemimpin disegala tingkatan, karena orang yang memiliki integritas biasanya memiliki sifat yang jujur, tangguh dan berkualitas bisa menjadi pemimpin bagi dirinya, mengenal jati dirinya, sehingga sadar menjaga kehormatan dirinya dari perilaku yang tidak terpuji.

Dalam melengkapi kepemimpinan ini, penulis juga mensitir pendapat Kouzer dan Posner dalam bukunya *“The Leadership Cholege)* mendefinisikan kepemimpinan adalah sebagai seni memobilisasi orang lain supaya ingin berjuang mengejar aspirasi bersama.<sup>9</sup> Kata ingin menurut Ermaya Suradinata kata ingin dalam definisi ini menjadi penting, sebab tanpa kata ingin, maka kepemimpinan akan berubah banyak sekali, selain itu tanpa kata ingin, maka kepemimpinan akan bermakna kurang melibatkan orang lain. Demikian juga pendapat Ronald Heifetz dan Laure berpendapat, kepemimpinan masa depan adalah seorang pemimpin yang adaptif terhadap tantangan, peraturan yang menekan, memperhatikan pemeliharaan disiplin, memberikan kembali berbagai keberhasilan organisasi kepada karyawan dan menjaga kepemimpinannya, sehingga menurut Ermaya Suradinata, kunci sukses pemimpin adalah bila pemimpin itu mampu menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan dan menjunjung tinggi norma dan nilai etika kehidupan. Oleh karena itu seluruh individu dalam organisasi baik pemimpin maupun karyawan, secara mandiri maupun bersama-sama harus mentaati harus mentaati etika dan mematuhi

Karena etika dan tata laku kepemimpinan merupakan salah satu wujud komitmen melaksanakan praktek-praktek *good Corporate Governance*, untuk melaksanakan pencapaian visi dan misi organisasi. Visi dan misi organisasi memiliki tata nilai unggulan yang didalamnya ada unsur-unsur:

1. Integritas, bersikap jujur, adil dan terbuka serta bertanggung jawab
2. Belajar terus menerus, selalu meningkatkan kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing.
3. Terpanggil, bekerja dengan segenap hati-hati, tulus, ikhlas dan rasa syukur
4. Peduli pada sesame, menjaga keharmonisan hubungan, menjaga kata dan perbuatan.

---

<sup>9</sup> Bahan Seminar Nasional ke 13 STIPAN 2017

5. Berpikir kreatif, menerima dan terbuka terhadap ide- ide baru
6. Bertanggung jawab, menuntaskan masalah, bukan sekedar mencari penyebabnya atau bahkan menutupinya

Kemudian Ermaya Suradinata mengemukakan hasil pemikirannya tentang kepemimpinan yang dikenal dengan nama “Model Analisis “ASOCA” yaitu bagaimana menerapkan kepemimpinan sebagai strategi dalam membangun karakter bangsa Indonesia? Adalah sebuah konsep pengembangan dengan memperhatikan khusus pada aspek ability yaitu kemampuan aspek *Streght* yaitu mengandalkan kekuatan, aspek *apportunity* yaitu kesempatan dan aspek *culture* yaitu budaya yang sangat menentukan adanya *Agility* yaitu kecerdasan.

Dari pendapat ahli tentang kepemimpinan yang baik semua mengemukakan pentingnya moralitas ada pada jiwa pemimpin demikian juga Prayudi Atmosudirjo berpendapat untuk menjadi pemimpin memiliki syarat-syarat untuk bisa menyelenggarakan pemerintahan yaitu antara lain.<sup>10</sup>

1. Efektifitas: kegiatannya harus mengenai sasaran artinya kesejahteraan seluruh rakyat, bukan kelompok tertentu saja.
2. Legitimitas; kegiatan administrasi Negara jangan sampai menimbulkan kehebohan oleh karena tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat atau lingkungan yang bersangkutan.
3. Yuridikitas; syarat-syarat yang menyatakan bahwa kepatuhan, perbuatan para pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum dalam arti luas.
4. Legalitas: syarat yang menyatakan bahwa perbuatan atau keputusan administrasi negara tidak boleh dilakukan tanpa dasar undang-undang. Bila sesuatu dijalankan dengan dalih keadaan darurat, keadaan itu wajib dibuktikan kemudian. Jika tidak terbukti, maka perbuatan itu dapat digugat dipengadilan
5. Moralitas: salah satu syarat yang paling diperhatikan dalam masyarakat, moral dan etika ataupun kedinasan wajib dijunjung tinggi.
6. Efisiensi, wajib dikejar seoptimal mungkin, kehematan biaya dan produktifitas wajib diusahakan setinggi-tingginya.

---

<sup>10</sup> M. Makhfudz, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogya, 2013, hal 12

Demikian dari uraian tersebut disimpulkan betapa pentingnya faktor moral, etika yang dikemukakan para ahli. Hal ini sesuai dengan sumbernya atau firman Tuhan, syarat manusia yang baik adalah:

1. Bila manusia itu memiliki akhlak terhadap Tuhannya artinya memiliki sikap tak pernah membantah perintah Tuhannya dan selalu menjauhi larangannya
2. Bila manusia selalu bersikap santun terhadap sesama manusia artinya selalu menghargai dan menghormati sesamanya.
3. Bila manusia bisa bersikap memulyakan tetangga dengan motto tetangga adalah saudara terdekat siapapun tetangganya.
4. Bila manusia bisa bersikap memuliakan tamunya artinya pintu rumah selalu terbuka untuk menerima silaturahmi siapapun yang datang.

Dari keempat dimaksud setiap kegiatan manusia harus disadari akan dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhannya, sehingga tidak mungkin berbuat yang tidak terpuji yang bisa merosostkan kehormatan diri dan kemulyaannya.

Dengan demikian betapa pentingnya faktor moral etik ada pada pemimpin, demikian juga etika ada pada jiwa aparatur karena dialah yang harus melakukan pelayanan publik untuk menulis mensitir undang undang yang mengatur Aparatur Sipil Negara, seperti tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi: “Pegawai ASN berperan sebagai sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penulis berpendapat mengingat demikian pentingnya peran ASN, maka penulis memandang pentingnya moral etik ada pada jiwa ASN sebagaimana pendapat Ageng Wahyudi dalam pendapatnya, menyatakan etika, termasuk etika birokrasi, mempunyai dua fungsi yaitu **pertama**, sebagai pedoman, acuan, referensi bagi administrasi negara (birokrasi publik) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakannya dalam organisasi tadi dinilai baik, terpuji dan tidak tercela.

**Kedua** etika birokrasi sebagai standar penilaiannya mengenai sifat, perilaku dan tindakan birokrasi publik dinilai baik, tidak tercela dan terpuji.<sup>11</sup> Dengan demikian Anderson juga menambahkan suatu point baru yaitu: standar yang digunakan sebagai dasar keputusan tersebut sedapat mungkin, merefleksikan nilai-nilai dasar dari masyarakat yang dilayani. Setiap birokrasi pelayanan publik wajib memiliki sikap mental dan prilaku yang mencerminkan keunggulan watak, keluhuran budi dan asas etis. Seorang birokrat wajib mengembangkan diri, sehingga sungguh sungguh memahami, menghayati dan menerapkan berbagai asas yang bersumber pada kebajikan-kebajikan moral khususnya keadilan dalam tindakan jabatannya. Secara umum nilai-nilai moral terlihat dari enam nilai besar atau yang dikenal dengan “*six great ideas*” 5 (lima) yaitu nilai kebenaran (*truth*), kebaikan (*goodness*), keindahan (*beauty*), kebebasan (*liberty*), kesamaan (*equality*) dan keadilan (*justice*).

Dalam kehidupan bermasyarakat seseorang sering dinilai dari tutur katanya, sikap dan prilakunya sejalan dengan nilai-nilai tersebut atau tidak. Begitu pula dalam pemberian pelayanan publik, tutur kata, sikap dan prilaku para pemberi pelayanan seringkali dijadikan objek penilaian dimana nilai-nilai besar tersebut dijadikan ukurannya. Disamping nilai-nilai dasar tersebut mungkin ada juga nilai-nilai lain yang dianggap penting untuk mensukseskan pemberian pelayanan, yang dari waktu ke waktu terus dinilai, dikembangkan dan dipromosikan. Dalam dunia pelayanan public, etika diartikan sebagai filsafat moral atau nilai dan disebut dengan “*professional Standart*” (kode etik) atau “*Right Rules of conduct*” (aturan perilaku yang benar) yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik. Sebuah kode etik merumuskan berbagai tindakan apa, kelakuan mana dan sikap bagaimana yang wajib dijalankan atau dihindari oleh para pemberi pelayanan.

Aplikasi etika dan moral dalam praktek dapat dilihat dari kode etik yang dimiliki oleh birokrasi publik. Kode etik ini terlihat tidak tertulis khususnya, tapi sebetulnya ada setiap ajaran agama, seperti Islam ada di Al-qur’an dan Hadist, misalnya ada ajaran Nabi Mumammad yang memerintahkan agama dalam setiap melayani harus selalu dengan senyum, senyum adalah bagian dari ibadah dan

---

<sup>11</sup> Jurnal Pemerintahan Vol 11 Nomor 2, Jakarta, Juli 2016 ISSN 1693-072X hal 40

sebagainya. Namun rupanya masyarakat belum bisa menghayati apalagi mengamalkan, apalagi dalam lingkungannya birokrasi tidak ada pemimpin memberi contoh, kode etik yang dimengerti masyarakat di Indonesia hanya berlaku bagi kalangan khususnya seperti pada advokat dan dokter. Kode etik tidak hanya sekedar bacaan, tetapi harus diimplementasikan dalam melaksanakan tugasnya dinilai tingkat implementasinya melalui mekanisme monitoring, kemudian di evaluasi dan diupayakan perbaikan melalui komitmen. Komitmen terhadap perbaikan etika ini perlu ditunjukkan agar masyarakat semakin yakin, bahwa birokrasi, publik sungguh sungguh akuntabel dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publiknya. Yang membuat prihatin penulis hasil survey, seorang aparatur yang telah mengetahui kode etik yang bersumber pada agama hilang setelah menduduki jabatan. Seolah jabatan itu bisa menutupi kejelekan budinya, akhirnya terjerumuslah mereka lupa kewajiban melakukan pelayanan seharusnya melayani menjadi dilayani.

Setiap tindakan pegawai ASN yang juga sebagai aparatur Negara dalam kondisi era reformasi terus menjadi sorotan masyarakat, masih ada kesan harus dilayani bukan melayani, pelayanan yang mudah dibuat menjadi sulit dan berbelit, lama dan mahal, melenceng dari kewajiban yang sudah diatur, serta banyak sekali melakukan mal administrasi seperti tercermin yang dilakukan oleh pemimpin daerah seperti Gubernur, Bupati/Walikota yang berhasil ditangkap operasi OTT KPK sampai berjumlah 79 (Bupati/Walikota), mereka semua telah menghidupkan kembali budaya KKN (Kolosi, Korupsi dan Nepotisme), misalnya telah menghidupkan kembali aksi jual beli jabatan dilingkungan. Terlihat sekali peran partai dalam membangun kadernya untuk menjadi pemimpin telah gagal, terbukti ada partai yang mayoritas kadernya jadi pemimpin daerah telah melahirkan kolusi dengan melakukan jual beli jabatan dan sebagainya. Sehingga terjadi hal yang tidak indah dipandang mata, karena telah melanggar nilai keindahan (*beauty*) dimana pemimpinnya tertangkap OTT KPK bawahannya menyambut dengan evoria.

Jadi di era reformasi telah berjalan melanggar komitmen/ janji reformasi sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Negara



RI No.75 Tahun 1999. Namun rezim ini sedang tunjukan kegagahannya melawan KPK yang telah ditunjuk keberaniannya menangkap kader partai. Dengan Pansus Angkat KK sedang berusaha melawan KPK karena telah dianggap bermain politik sehingga terus berusaha membekukan KPK agar menghentikan melakukan OTT kader paratai. Menurut penulis kini rezim ini telah menunjukkan barisan koruptor yang masih kuat untuk melawan KPK, terbukti dengan gerakannya membekukan KPK dengan melakukan kerjasama dengan DPR

Kejagung dan kepolisian. DPR, Kejagung dan Kepolisian telah mengadili KPK seolah-olah KPK telah bersalah. Mereka telah mengundang para koruptor yang telah dijatuhi hukuman oleh KPK atau melalui peradilan Tipikor diundang istimewa ke DPR untuk adili KPK seolah olah telah melanggar konstitusi. Ketiga lembaga tindakan menyerang KPK diimbangi dengan sikap Presiden yang diam seolah olah merestuinnya, hanya terkandang keluarkan suara dari istana, mengharapkan KPK diperkuat tidak sesuai dengan kondisi senyatanya dimana KPK sedang dijepit, diserang dilucuti seolah olah tidak mengetahuinya. Penulis hanya bertanya mengapa diam? Tak ada daya untuk mengkritisi pintu-pintu telah ditutup oleh rezim terbukti banyak rakyat kritis telah ditangkap, dituduh mencemari.

Fenomena ini menurut penulis bisa menjadi pembelajaran politik bagi masyarakat pemilih untuk membekalinya menghadapi proses demokrasi baik itu Pilkada maupun Pemilu agar rakyat tidak jadi objek komoditi politik partai, tapi bisa membuatnya cerdas dan peka untuk mengambil keputusan dalam melakukan hak pilihnya tak lagi didikte oleh partai poitik. Pemilih bisa peka melakukan hak pilihnya dengan melihat informasi kader partai mana dari pemimpin daerah yang tertangkap OTT KPK dan kini bisa melihat pergerakan emigrasi pendukung fanatisme yang sudah mulai berpindah seperti di daerah banten, Medan, Yogya dan Bandung serta Jakarta tadinya sebagai pusatnya partai tertentu kini berpindah dukungan ke partai lain.

Pendukung partai melakukan rotasi, pindah dukungan adalah hal yang wajar, karena mereka telah cerdas membaca fenomena untuk menghindari perilaku pemimpin yang koruptif dan terbukti telah menghidupkan perilaku jelek yang telah menyimpang dari komitmen reformasi dengan menuntut para aparatur

pemerintah itu mempunyai dan mengembangkan akuntabilitas moral pada diri mereka. Namun sayangnya tanggung jawab moral dan tanggung jawab professional belum hidup dihati nurani para aparatur ASN, sehingga untuk menilai baik buruknya pelayanan tergantung pada penerapan nilai-nilai sebagai berikut: **Pertama**, efisiensi para birokrat tidak boros dalam melakukan tugas-tugas pelayanan pada msyarakat. Artinya para birokrat secara hati hati agar memberikan hasil yang sebesar besarnya kepada publik. Dengan nilai efesiensi lebih mengarahkan kepada penggunaan sumber yang dimiliki secara cepat dan tepat tidak boros dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Jadi dapat disebut baik (etis) jika birokrat dalam melakukannya tugasnya sesuai dengan kewenangannya.

**Kedua**, efektifitas yaitu birokrat dalam melaksanakan tugasnya pelayanan publikk harus baik (etis) apabila memenuhi target atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya tercapai. **Ketiga**, kualitas pelayanan yang diberikan oleh para birokrat kepada publik harus memberikan kepuasan kepada yang dilayani. **Keempat**, responsivitas yaitu berkaitan dengan tanggung jawab birokrat dalam merespon kebutuhan publik yang sangat mendesak birokrat dalam menjalankan tugasnya dinilai baik jika responsible dan memiliki profesional atau kompetensi yang sangat tinggi. **Kelima**, akuntabilitas artinya berkaitan dengan pertanggungjawabkan dalam melaksanakan tugasnya dan kewenangan dalam pelayanan publik. Birokrat yang baik adalah birokrat yang akuntabel dalam melaksanakan tugas dan kewenangan.

Kode etik profesi adalah daftar kewajiban yang harus ditaati dan dibuat oleh profesi tertentu serta mengikat semua anggotannya dan merupakan petunjuk/pedoman yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi sekaligus menjamin kualitas/ mutu moral dimata msyarakat. Biasanya itu berwujud norma yang tidak tertulis, namun diakui, hidup dilingkungannya serta dipatuhi oleh seluruh anggotanya/ masyarakat, wujudnya bisa diajaran agama yang ada dilingkungannya. Adapula yang diwujudkan dalam aturan tertulis dengan sanksi yang pengenaannya bisa dipaksakan seperti kode etik advokat, kode etik kedokteran. Kini juga diberlakukan bagi ASN dengan maksud agar ASN bisa

menjaga martabat dan kehormatan pegawai ASN yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang Undang RI No. 5 Tahun 2014 berbunyi:

1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab dan berintegritas tinggi,
2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin,
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan,
4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan dan/ atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan.
6. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.

Kini memilih pemimpin menjadi hal yang sulit, karena kini pemimpin bisa datang dari/ melalui pemilihan politis. sedang pemilihan yang berlaku dipartai caranya berbeda dalam arti menurut partainya dengan pertimbangan yang menguntungkan partai tersebut. Jadi bak membeli kucing dalam karung. Dalam arti belum tentu yang diidolakan rakyatnya walau dengan segudang prestasi kata partai, seperti dirakyatnya walau dengan segudang prestasi kita partai seperti yang dicontohkan figur Bupati tegal, katanya segudang/prestasi tapi prestasi dari bidang yang berbeda.

Akhirnya kenyataan prestasi Bupati tersebut tidak sesuai harapan rakyat. Ternyata Bupati dalam kerjanya telah menghidupkan sesuatu yang tidak diharapkan, karena membuat pelayanan menjadi berbelit- belit demikian juga dirasakan pegawai tidak bisa menjamin kariernya, yang bisa dijadikan motivasi atas prestasi yang ditunjukkan oleh pegawainya, karena dibuat jual beli jabatan. Pegawai yang bisa meniti kariernya hanya bisa dicapai oleh mereka yang memiliki uang , karena harus membayar. Hal ini terjadi yang dilakukan oleh para Bupati dibeberapa daerah lainnya seperti di Kebumen, Tegal, Ngajuk, Klaten, dan sebagainya. Untung KPK sigap berhasil menangkapnya, sehingga bisa dihentikan praktek jual beli jabatan.

Jadi perubahan ini harus dilakukan secara serempak demikian juga regenerasi pada partai juga harus dilakukan secara serempak oleh partai partai untuk bangun kader-kadernya, ciptakan pemimpin masa depan, seperti yang dilakukan oleh partai partai zaman dahulu (orde lama), seperti penulis kenal tokoh dahulu kala, seperti Alisastro Amijoyo, Sutan Syahrir, M.Natsir, Rasid Baswedan (ayahnya Bapak Anis). Tokoh-tokoh tersebut telah bisa tunjukkan sikap dan perilaku yang luhur dan mulia, penulis menilai beliau- beliau sebagai pemimpin telah mampu menguasai kemampuan yang tinggi untuk mewujudkan visinya yang dilandasi oleh nilai-nilai yang luhur perilakunya dan keberaniannya untuk mengambil keputusan.

Demikian juga kemampuannya didukung oleh kompetensi yang tinggi baik menyangkut pengetahuan (*know ledge*), keterampilan (*skill*) maupun kematangan psikologisnya. Tidak seperti orientasi, partai masa kini hanya bisa tunjukkan bila telah jadi pengurus partai menjadi orang kaya mendadak, harta berlimpah yang ngak tahu harta dari mana? Semua hal itu bisa dihindari bila para pemimpin memiliki sikap yang konsisten dalam bidang disiplin berperilaku yang dilandasi pada pedoman hal-hal yng sesuai dengan petunjuk sang pencipta, sehingga bisa memiliki mainset seorang pemimpin yang lebih mengarah kepada “memimpin” adalah amanah, kewajiban bukan hak dengan demikian ia akan memimpin kebersihan hati nurani bukan menumpuk harta dan sebagainya.

Sungguh aneh dan jauh dari kriteria kepemimpinan khas Indonesia yang unggul diwacanakan antara lain:

1. Beriman dan bertaqwa yang terpancar dalam sikap moral, akhlak yang mulia dan karakter yang terpuji sehingga menjadi jati diri;
2. Memiliki kepemimpinan yang telah teruji termasuk didalamnya harus memiliki visi yang jelas
3. Memiliki wawasan sebagai faktor panduan harmonis dari kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional serta kecerdasan spiritual.
4. Memiliki keluarga yang sakinah, mawadah dan waramah
5. Memiliki kesehatan jasmani yang memadai dengan mendapatkan dukungan/kepercayaan dari rakyat.

Penulis berpendapat setelah melakukan penelitian dilapangan dan pengamatan, sikap partai kali ini berubah, cenderung lebih buruk, karena calon yang digadang-gadangkan tidak berasal dari kadernya. Tapi berdasarkan atas hasil transaksional, sang calon disuruh membeli partai yang menjamin dukungannya dengan uang yang sangat besar konon sampai ratusan milyar. Sehingga kini yang menjadi tokoh sentral partai besar bersifat menunggu sampai melihat dukungan rakyat maksimal dilapangan baru kemudian mendekati guna lakukan nego atau transaksi bak dagang sapi. Jadi calon pemimpin bukan tokoh yang digadang-gadangkan lama karena tidak berasal dari kadernya yang telah dibangun oleh partainya. Penulis merasa sangat perihatin melihat masa depan bangsa yang makin jauh dari harapan. Kalau bisa menemui pemimpin yang sukses membawa daerahnya yang makin baik dan makmur hanya faktor kebetulan saja bukan hasil pengkaderan partai. Wacana ideal diatur hanya sekedar buat bacaan saja yang tidak ada gunannya bagi bangsa

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Dari pembahasan permasalahan bangsa di atas yang diceritakan panjang lebar mulai dari gejolak Negara bangsa yang terjadi diseluruh jagad raya ini dalam hadapi globalisasi, demikian juga permasalahan negara bangsa yang menghadapi krisis kepemimpinan untuk tingkatan daya saing bangsa dapat disimpulkan:

1. Penulis dalam menulis naskah ini banyak membahas faktor kepemimpinan untuk ciptakan pemimpin yang amanah dengan syarat atau unsur-unsur pemimpin yang ideal dari berbagai pendapat sarjana dari sumber-sumber terpercaya. Unsur tersebut diuraikan dengan teknis analisis secara panjang lebar dengan melihat fenomena dilapangan dengan membandingkan antara teori yang menjadi harapan bangsa dan kenyataan dilapangan yang terjadi.
2. Penulis juga telah menggambarkan kondisi Negara dalam kancah persaingan global dilihat dari eksistensi maupun rangking yang dibuat berdasarkan penelitian dilapangan baik dari segi peringkat pembangunan manusia maupun peringkat pelayanan publiknya sampai peringkat prestasi dalam mengelola dan menyelenggarakan negaranya.

3. Penulis juga dalam naskah ini telah membahas kondisi aparat sipil negaranya mulai dari kondisi penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai etika dan kondisi penghayatan terhadap kode etik yang telah dirumuskan dalam sebuah aturan tertulis yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang HSN terbaru telah mengatur kewajiban HSN nya sebagai kode etik yang bias dipaksakan penerapannya.
4. Penulis juga membahas tentang peran partai politik dalam ikut serta menciptakan pemimpin yang memiliki kepemimpinan yang mumpuni demikian juga telah membahas kondisi partai dalam melakukan pengkaderan untuk ciptakan pemimpin yang manah serta prakteknya partai dalam memilih pemimpin untuk memimpin di daerah.
5. Dari empat point bahasan penulis yang diperoleh dari survey dilapangan hasilnya yang masih memprihatinkan masa depan Negara bangsa ini menghadapi persaingan yang maikin tajam.

## **SARAN**

1. Dari bahasan naskah di atas penulis sarankan agar partai politik melakukan pengkaderan calon pemimpin agar bisa menjadi pemimpin yang amanah yang melaksanakan kewajiban bukan hak dan tunjukan dalam memimpin daerahnya dengan penuh keluhuran moral etik dan bisa melakukan perubahan
2. Para tokoh partai bisa merubah sikapnya dalam menjaring calon pemimpin bukan dengan cara asal mencomot calon pemimpin menunggu bila melihat banyak dukungannya kemudian didukung dengan cara agar calon pemimpin tersebut disuruh membeli dukungan dari partai tersebut (Transaksional). Penulis mengharapkan calon pemimpin itu adalah hasil daya upaya partai melalui pengkaderan yang dilakukan dalam waktu lama sehingga menjadi calon pemimpin yang sudah digadang-gadangkan sejak lama.
3. Mensarankan kepada legiaslatif agar merumuskan undang-undang kepartaian baru yang mencantumkan pengkaderan pemimpin menjadi kewajiban partai peserta pemilu dan member aturan saksi bagi partai yang terbukti dilapangan menghasilkan kader yang tidak sesuai dengan komitmen reformasi agar dibubarkan, komitmen reformasi adalah partai yang

mendukung terwujudnya pemerintahan yang bebas dari KKN, karena Undang-undang kepartaian baru bisa mencerminkan partai bentukan era reformasi harus reformis sehingga wajib wujudkan janji atau komitmen reformasi bila tidak partai harus bubar.

## DAFTAR PUSAKA

- Assidiqie Jimmly, 2009, *Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Desi Fernada MSO, 2006, *Etika Organisasi Pemerintahan*, LANRI.
- Harbani Pasulong, 2010, *Perilaku Birokrasi, dalam Pelayanan Publik*, Penerbit Andi Jakarta.
- M. Makhfudz, 2013 *Hukum Adminstrasi Negara*, Graja Ilmu Yogya.
- Suparlan, 2012, *Pendidikan Karakter*, Hikayat, Jakarta.
- Sofiah, 2008, *Perilaku Organisasi*, Penerbit Andi , Jakarta.
- Tohoha Miftah, 1999, *Deregulasi dan Debirokrasi, Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Masyarakat dan Pembangunan Adminstrasi di Indonesia*, PT Pustaka, LPES, Jakarta.
- Peter M Blaw, Marshallw, Meyer,2000, *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*, penerbit Prestasi Pustaka Raya Jakarta.
- Hadjon Philipus, 2002, *M. Pengantar Hukum Adminstrasi Indonesia. Introduction to Indonesian Adminstrative Law*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke 41 No.1 Januari 2011 ISSN 02159687.
- Jurnal Pemerintahan, Vol 11 No.2 Juli 2016 ISSN 1693072 X Buletin Swara ISSN 1425536 Edisi 10 tahun 2004,
- Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dari KKN.